PENULISAN SKRIPSI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI SITA EKSEKUSI YANG DIHADAPKAN PADA HAK TANGGUNGAN

Diajukan oleh :

Albert Dwijulian Tuerah

NPM	**:**	**220514720**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI SITA EKSEKUSI YANG DIHADAPKAN PADA HAK TANGGUNGAN

Diajukan oleh :

Albert Dwijulian Tuerah

NPM	**:**	**220514720**
Program Studi	**:**	**Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Tanggal: 24 Maret 2026

Dosen Pembibing

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI SITA EKSEKUSI YANG DIHADAPKAN PADA HAK TANGGUNGAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	**:**	**Jumat**
Tanggal	**:**	**17 April 2026**
Tempat	**:**	**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua	**:**	**Dr. W Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**
Sekretaris	**:**	**Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**
Anggota	**:**	**B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya yang selalu hadir, sehingga penulisan hukum dengan judul **"Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Sita Eksekusi Yang Dihadapkan Pada Hak Tanggungan"** telah selesai saya tulis guna melengkapi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Latar belakang penulisan hukum ini adalah pandangan negara ketika ingin melakukan sita aset dari hasil kejahatan guna mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan, sebab kekhawatiran muncul apabila aset yang akan disita oleh negara yang dengan sengaja dihadapkan pada hak tanggungan sehingga menjadi perdebatan antara hak negara dengan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Oleh sebab keadaan tersebut harus dikaji lebih lanjut melalui pemahaman hukum keuangan negara dan ajaran-ajaran terkait hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini yang telah dipelajari di Program Kekhususan Hukum tentang Kenegaraan dan Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini pula tentu saja tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan karya ini;

2. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran;
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan;
4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta pendampingan secara profesional kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. C. Kastowo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan saya masukan dan saran akademik selama perkuliahan berlangsung;
6. Bapak Dr. Akmal Kodrat, S.H., M.Hum, Bapak Melly Suranta Ginting, S.H., M.H, Dany Agusta Matheos Salmun, S.H., M.H, Salesius Guntur, S.H., M.H, beserta jajarannya selaku Jaksa yang membantu, memotivasi, membimbing saya dalam perjalanan penulisan skripsi ini, dan penerimaan selama saya melaksanakan magang di Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
7. Rm. A. Agus Ariestiyanto, MSF, Rm. Sadana Hadiwardaya, MSF, Rm. Floribertus Hasto Rosariyanto, SJ, Rm. Yohanes Agus Setiyono, SJ, Rm. Doni Erlangga, SJ, Rm. Gandhi Hartono TB., SJ, Rm. Alfonsus Ardi J., SJ, Br. Dieng Karnedi, SJ, Br. Joseph Matter, SJ, Br. Ignatius U. Jumeno, SJ, Fr. Wahyu, SJ, Fr. Alfred, SJ, Fr. TB, SJ, beserta Romo, Bruder, Frater dan teman-teman Promosi Panggilan Serikat Yesuit atas doa, dukungan, dan saran selama penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Kepada *Waduh Team*: Richard Willie Handoyo, Efraim, Yehuda Shalom, Rafael Adrian Wicaksono, Daniel Gunawan, Michael Nova Sanjaya, Steven Lo, Gabriel

Sergio Dante, Maulana Ghazy Al Ghifari, Maria Shintia Indaryadi, Antonius Bintang Fajar Dwi Kusuma, dan Grisella Nathaniella, yang menerima saya sebagai teman belajar, berpikir, dan bersenang-senang selama ini;

9. Kepada teman-teman dari Palangka Raya : Anastasya, Gracia Nata, Hillary Andini, Febrinitha Kristin Alexa, Rafael Febrian, Maria Fromely Agny, Christanto P. Tarigan, Adhi Kristantyo, Maria Rosa Mestika Amiani, Rosa Angelica Amiani, yang selama ini menemani dari awal sampai penulisan hukum ini dibuat;
10. Kepada segenap Keluarga : Mamah Hesty Dorothea Tuerah, Papah Jhon Kennedy, Kaka Efrilius Danuarta Tuerah, beserta Keluarga Besar saya yang mendoakan, mendukung, dan menyemangati selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.

Bahwa disadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulisan hukum ini menerima kritikan, saran, dan masukan yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang membacanya.

Yogyakarta, 16 Maret 2026

Penulis,



Albert Dwijulian Tuerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the settlement of state financial losses through the mechanism of execution seizure as an effort to recover state finances resulting from criminal acts, particularly corruption offenses. In the perspective of State Finance Law, state financial loss refers to a reduction of money, securities, or goods that is real and certain in amount as a result of unlawful acts, whether committed intentionally or due to negligence. In the effort to recover state financial losses, the court may impose an additional penalty in the form of restitution (payment of substitute money) on the convicted person who caused the state loss. If the convicted person does not possess sufficient funds to pay the restitution, the prosecutor as the executor, through a Warrant for Asset Tracing (P-48A) issued by the court, is authorized to carry out execution seizure of the convict's assets to be auctioned and used to cover the resulting state financial losses. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, supported by literature studies and interviews with officials within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The findings indicate that the implementation of execution seizure often encounters obstacles, particularly when the assets to be seized have been encumbered with mortgage rights. This condition may delay the process of recovering state financial losses. Therefore, it is necessary to accelerate the execution seizure process, strengthen coordination among related institutions, and develop settlement strategies that prioritize both the protection of good faith third parties and the recovery of state financial losses.

Keywords: State Financial Losses, Execution Seizure, Mortgage Rights

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN x
BAB I 11
PENDAHULUAN 11
A. Latar Belakang Masalah 11
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 17
1. Manfaat Teoritis 17
2. Manfaat Praktis 18
E. Keaslian Penelitian 19
F. Batasan Konsep 24
G. Metode Penelitian 26
1. Jenis Penelitian 26
2. Sumber Data 26
3. Cara Pengumpulan Data 27
4. Analisis Data 29
BAB II 30
PEMBAHASAN 30
A. Upaya Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Sita Eksekusi yang Dihadapkan Pada Hak Tanggungan 30
1. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Negara 30
2. Tinjauan Umum Mengenai Sita Eksekusi 34
3. Tinjauan Umum Mengenai Hak Tanggungan 37

4. Upaya Penerapan Penyelesaian Kerugian Negara dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara 40

B. Kendala-Kendala terhadap Upaya Penyelamatan Kerugian Negara melalui Sita Eksekusi yang Dihadapkan pada Hak Tanggungan 46

1. Keterlambatan Proses Sita Eksekusi Menyebabkan Hilangnya Peluang Penyelamatan Kerugian Negara 46

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi yang Telah Dijaminkan kepada Pihak Ketiga 49

C. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelamatan kerugian negara melalui sita eksekusi yang dihadapkan pada hak tanggungan 51

1. Strategi Kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa antara Negara dan Pemegang Hak Tanggungan 51

2. Percepatan Proses Eksekusi untuk Mencegah Hilangnya Aset yang Dapat Digunakan untuk Menutup Kerugian Negara 54

BAB III 57

PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 64

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi/*legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika skripsi/*legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2026

Yang menyatakan,



Albert Dwijulian Tuerah